

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Strategi Pengembangan Potensi Desa Wisata

1. Pengertian Strategi Pengembangan

Secara etimologis, kata “strategi” berasal dari kata Yunani “strategos” yang berarti “umum”. Dengan demikian, istilah yang secara harfiah berarti “seni para jenderal” menggambarkan segala sesuatu yang menjadi inti tujuan suatu organisasi.¹ Proses memperbaiki sesuatu hingga mencapai kesempurnaan disebut pengembangan. Tiga tahapan kegiatan pembangunan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian.² Pembangunan adalah suatu usaha pendidikan yang terorganisir, akuntabel, terencana, terbimbing, dan formal atau informal, menurut Iskandar Wiryokusumo.³

Strategi pengembangan adalah transformasi terencana yang memerlukan dukungan dari manajer dan anggota staf lainnya selain pemangku kepentingan lainnya. Rencana yang matang diperlukan untuk pengembangan bisnis.⁴

Yoeti mendefinisikan pengembangan pariwisata sebagai segala upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan suatu produk atau memperluas

¹ George A. Steiner, *Kebijakan Dan Strategi Manajemen* (Jakarta: Erlangga, 1997). 18

² Punaji Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan & Pengembangan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).

³ Iskandar Wiryokusumo dan J. Mandalika, *Kumpulan-Kumpulan Pemikiran Dalam Pendidikan* (Jakarta: Rajawali, 1982). 93

⁴ Ricky W. Griffin, *Manajemen Jilid I, Alih Bahasa Gina Gania, Ed. Wisnu Chandra Kristiaji* (Jakarta: Erlangga, 2004). 226

cakupan pilihan pariwisata yang tersedia.⁵ Yoeti mengungkapkan, empat prinsip dasar pertumbuhan wisatawan adalah sebagai berikut:

- 1) Konsep keberlanjutan
- 2) Tumbuhnya pariwisata yang menunjukkan semakin besarnya peran masyarakat dalam kebudayaan dan kehidupan sehari-hari,
- 3) Pertumbuhan sektor pariwisata menjamin kelangsungan kegiatan perekonomian.
- 4) Meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Tujuan dari strategi pengembangan pariwisata adalah untuk menjamin bahwa pariwisata akan semakin meningkat di masa depan dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung perluasan ini dapat diakses.⁶

2. Potensi Desa Wisata

Potensi berasal dari bahasa Latin *potensia* yang berarti kemampuan. Potensi, dalam kata-kata Sri Habsari, adalah suatu atribut atau kemampuan yang ada dalam diri seseorang dan dapat dikembangkan dan ditingkatkan dengan prasarana dan sumber daya yang tepat. Menurut Kuncoro, potensi wisata ada dua kategori:

⁵ Aldila Febriyandani and Meirinawati, "Manajemen Strategi Dalam Pengembangan Obyek Wisata Bukit Kapur Jeddih Madura (Studi Pada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Bangkalan)," 53, no. 9 (2013): 1689–1699.

⁶ Fredrick Hendrick Mebri, Ermaya Suradinata, and Kusworo Kusworo, 'Internal Tourism Development Strategy Increasing Regional Original Income (Pad) in Jayapura City Papua Province', *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 12.1 (2022), 102–14.

a. Potensi Sumber Daya Alam

Potensi tersebut berasal dari faktor lingkungan, seperti jenis tumbuhan dan satwa yang ada di sana serta daya tarik bentang alam di sekitarnya, antara lain pantai, sungai, gunung, hutan, dan lain sebagainya. Manfaat yang melekat ini mempunyai potensi untuk menarik wisatawan jika dapat ditingkatkan lebih lanjut.

b. Potensi Sumber Daya Manusia

Manusia merupakan unsur yang paling penting dalam mencapai tujuan suatu organisasi. Oleh karena itu, manajemen harus mengutamakan sumber daya manusia. Tentu saja, memaksimalkan potensi sumber daya manusia dapat menghasilkan banyak inovasi dan kreativitas yang dapat meningkatkan daya tarik suatu destinasi pariwisata bagi pengunjung.

Strategi pengembangan potensi desa wisata merupakan suatu rencana yang menuntut para pemangku kepentingan untuk melihat lebih jauh potensi desa wisata, termasuk potensi alam dan sumber daya manusia, agar dapat menghasilkan desa wisata yang lebih baik, berdasarkan kriteria yang telah diberikan di atas. Akibatnya, rencana pertumbuhan tersebut bersifat jangka panjang dan pada akhirnya akan berdampak pada masyarakat dan organisasi.

3. Komponen Pengembangan Desa Wisata

Berikut ini merupakan komponen- komponen pengembangan Desa wisata berdasarkan teori dari Cooper,dkk dalam Setyanto dan Pangestuti :

Komponen pengembangan desa wisata sesuai teori Cooper dkk yang disampaikan dalam Setyanto dan Pangestuti adalah sebagai berikut:⁷

1) *Attraction* (Atraksi)

Daya tarik wisata, atau atraksi, memainkan peranan penting dalam menarik pengunjung. Sumber daya wisata adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata.

2) *Amenity* (Fasilitas)

Semuanya tersedia bagi para tamu untuk menjamin kenyamanan mereka selama berada di suatu objek wisata. Prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata merupakan tiga kategori yang dipisahkan fasilitas produk destinasinya.

3) *Accessibility* (Aksesibilitas)

Destinasi wisata harus mempunyai akses yang memadai agar dapat memudahkan akses tamu. Banyaknya moda transportasi memudahkan akses penting bagi wisatawan. Destinasi wisata perlu memiliki akses yang memadai agar dapat memudahkan kedatangan tamu. Aksesibilitas terkait dengan kemudahan transportasi dan aksesibilitas ke tempat-tempat wisata.

4) *Ancillary* (Pelayanan tambahan)

Wisatawan dan pelaku pariwisata dapat memanfaatkan layanan tambahan dari pemerintah daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan

⁷Alfitriani, Welly Andrika Putri, and Ummasyroh, 'Pengaruh Komponen 4A Terhadap Minat Kunjung Ulang Wisatawan Pada Destinasi Wisata Bayt Al-Qur'an Al-Akbar Kota Palembang', *Aplikasi Manajemen & Bisnis*, 1.2 (2021), 66–77.

menawarkan pemandu wisata, brosur, poster, dan layanan informasi wisata lainnya. Selain itu, harus ada pembangunan fisik seperti jalan yang terang, undang-undang yang menarik, dan akses jalan.

B. Konsep Desa Wisata

1. Pengertian Desa Wisata

Desa wisata merupakan suatu tempat yang berpotensi menarik wisatawan dan menjadi daya tarik wisata populer.⁸ Dalam Hadiwijoyo, desa wisata digambarkan Inti Rakyat Wisata (PIR) sebagai kawasan pedesaan yang tetap mempertahankan individualitas dan keunikannya dalam kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, kehidupan sehari-hari, arsitektur bangunan, dan pola tata ruang khas desa.

Menurut Nuryanti, desa wisata merupakan suatu cara untuk menggabungkan perumahan, kontak sosial, dan layanan pendukung ke dalam struktur kehidupan masyarakat yang sejalan dengan adat dan praktik setempat.⁹ Berdasarkan tingkat pengembangannya, desa wisata dibagi menjadi tiga kategori, antara lain :

a. Desa Wisata Embrio

Pada tahap ini, diakui adanya desa yang berpotensi menjadi daerah tujuan wisata. Saat ini sedang dilakukan upaya untuk membentuk komunitas pariwisata.

⁸ Bagus Sudibya, 'Strategi Pengembangan Desa Wisata Berkelanjutan Di Indonesia', *Jurnal Bali Membangun Bali*, 1.1 (1970), 22–26.

⁹ Hendi Prasetyo. Novi Irawati, Zahrotun Satriawati, 'Buku Ajar Pariwisata Berbasis Pedesaan Konsep, Praktik, Dan Pengembangan', 2023, 1–60.

b. Desa Wisata Berkembang

Pada tahap ini, kelompok swadaya desa dan masyarakat setempat bertugas mengelola desa wisata tersebut. Wisatawan berdatangan sebagai hasil dari promosi yang dijalankan pihak manajemen

c. Desa Wisata Maju

Pada tahap ini, desa wisata telah ditangani dengan baik dengan bantuan organisasi pendukung seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan telah mempertahankan kunjungan wisatawan.

2. Kriteria Desa Wisata

Menurut Antara & Arida dalam Istijagaul Aliyah, suatu masyarakat harus memenuhi beberapa syarat untuk dapat menjadi desa wisata, antara lain:¹⁰

a. Atraksi wisata

Atraksi yang dipilih haruslah yang paling menarik di kawasan tersebut, khususnya menampilkan gaya, budaya, dan kreasi manusia setempat.

b. Jarak tempuh

Penting untuk mengevaluasi jarak antara destinasi wisata dan perumahan pengunjung

c. Besaran desa

¹⁰ Istijabatul Aliyah, Galing Yudana, and Rara Sugiarti, *Desa Wisata Berwawasan Ekobudaya: Kawasan Wisata Industri Lurik, Yayasan Kita Menulis* (Surakarta, 2020). 12

Daya dukung pemukiman bagi wisatawan dipengaruhi oleh ukurannya. Luas desa, jumlah penduduk, dan jumlah tempat tinggal semuanya berkontribusi terhadap luas desa secara keseluruhan.

d. Sistem kepercayaan dan kemasyarakatan

Kedua sistem ini sangat erat kaitannya karena untuk menjaga kepariwisataan, sebuah desa wisata tunduk pada peraturan unik yang menuntut kepercayaan dari masyarakat setempat.

e. Ketersediaan infrastruktur

Prasarana yang ada di tempat ini terdiri dari berbagai fasilitas dan pelayanan yang menjadi daya tarik desa wisata. dimulai dengan utilitas seperti listrik, air bersih, dan transportasi.

3. Desa Wisata Dalam Islam

Desa wisata berbasis syariah merupakan daerah pedesaan yang memiliki atraksi khusus menjadi kawasan tujuan untuk menikmati, menghibur, melihat, mempelajari dan mengkonsumsi produk atau jasa sesuai dengan prinsip syariah dari Desa tersebut. Pariwisata islam bagi wisatawan muslim merupakan salah satu media dakwah. Bagi wisatawan yang non-muslim, pariwisata islam dengan produk halal memiliki jaminan sehat karena telah memiliki sertifikasi halal MUI dengan melewati Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), kepastian akan jaminan halal, sehat dan bersih dapat dinikmati baik muslim ataupun non muslim.¹¹

¹¹ Taufiqur Rochman and others, 'Analisis Pengembangan Potensi Desa', 6.1 (2021), 215–36.

Pentingnya pengembangan pariwisata syariah mulai dari Desa wisata yang menetapkan prinsip syariah dalam mengelola wisatanya, hal tersebut akan membawa dampak yang baik untuk peningkatan dalam berbagai sektor, mulai dari sektor pendidikan, sosial, religi, ekonomi dan lain sebagainya. Ada tiga faktor penting yang harus diperhatikan untuk mendukung pariwisata dalam islam yaitu:¹²

a. Lokasi

Sebuah tempat yang diizinkan karena sesuai prinsip syariah dianggap dapat meningkatkan nilai keimanan para wisatawan dan tujuan wisata tidak bertentangan dengan syariat islam.

b. Konsumsi

Kehalalan konsumsi memiliki peran sangat penting bagi wisatawan dalam memilih tujuan wisata. ketersediaan makanan dan minuman yang halal merupakan suatu bentuk penghargaan atas apa yang umat islam percayai.

c. Penginapan

Semua kegiatan pengoperasian sistem kerja dan fasilitas sesuai dengan syariah. Semua layanan tidak hanya ada makanan dan minuman melainkan juga pada fasilitas yang disediakan.

¹² Fitratun Ramdhani, 'Implikasi Pariwisata Syariah Terhadap Peningkatan Pendapatan Dan Kesejahteraan Masyarakat', *Jurnal Muslim Heritage*, 3 (2018). 25

C. *Community Based Tourism*

1. *Pengertian Community Based Tourism*

Konsep *Community Based Tourism* (CBT) melibatkan masyarakat dalam tahap perencanaan, pengelolaan, dan pengambilan keputusan pengembangan suatu destinasi wisata lokal. Wisata petualangan, wisata budaya, dan ekowisata merupakan contoh kegiatan yang dapat memperkuat filosofi CBT.¹³

Bank Dunia mengklaim bahwa ide ini akan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Pilihan tersebut berkaitan dengan mencari uang, menyediakan lapangan kerja, menjaga lingkungan, dan menjunjung tinggi budaya asli daerah guna menumbuhkan kepercayaan terhadap potensi pariwisata daerah.

Ada dua metode dalam dasar-dasar perencanaan pariwisata. Pertama, perencanaan resmi dengan penekanan pada potensi manfaat ekowisata. Kedua, perencanaan cenderung lebih menekankan pertumbuhan yang berimbang dan bersifat partisipatif dan terkendali. Strategi ini lebih menekankan pengaruh dan kepekaan pengembangan ekowisata terhadap lingkungan dibandingkan metode sebelumnya.

¹³Tri Asih Wismaningtyas and others, 'Community Based Tourism Dalam Pengembangan Pariwisata Di Desa Ngargogondo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang', *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 7.4 (2022) <https://doi.org/10.36982/jpg.v7i4.2525>

2. Konsep *Community Based Tourism*

Konsep *Community Based Tourism* (CBT) merepresentasikan penerapan ekonomi kerakyatan di dunia nyata, yang digerakkan oleh komunitas dan dinikmati langsung oleh mereka. Nicole Hausler mendefinisikan pariwisata berbasis komunitas sebagai berikut.¹⁴

- a. Masyarakat lokal dapat berpartisipasi langsung dalam kegiatan yang berhubungan dengan wisata
- b. Desa wisata dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- c. Menghimbau agar masyarakat kurang mampu diberdayakan.

Menurut Drake, konsep *Community Based Tourism* terutama didasarkan pada partisipasi masyarakat, yang dilaksanakan dalam tiga tahap: perencanaan, pelaksanaan, dan penggunaan manfaat.

- 1) Tahap perenanaan adalah saat masyarakat terlibat aktif dalam proses pada tahap perencanaan
- 2) Tahapan pelaksanaan merupakan suatu jenis tindakan yang dihasilkan dari keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program pengembangan desa wisata.

¹⁴ Sri Endah Nurhidayati and Chalid Fandeli, 'Penerapan Prinsip Community Based Tourism (CBT) Dalam Pengembangan Agrowisata Di Kota Batu , Jawa Timur', *Jejaring Administrasi Publik*, IV.1 (2012), 36–46.

- 3) Tahap Pemanfaatan keuntungan setiap orang di masyarakat, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung, terkena dampak tahap penggunaan manfaat.¹⁵

3. Prinsip Community Based Tourism

Suansri mengembangkan lima prinsip yang merupakan aspek utama dalam pengembangan Community Based Tourism, yaitu :¹⁶

- a. Prinsip Ekonomi

Prinsip ekonomi dengan indikator timbulnya dana untuk pengembangan komunitas, terciptanya lapangan pekerjaan di sektor pariwisata dan timbulnya pendapatan masyarakat lokal.

- b. Prinsip Sosial

Prinsip sosial dengan indikator terdapat peningkatan kualitas hidup, adanya peningkatan kebanggaan komunitas, pembagian peran yang adil antara laki-laki dan perempuan, generasi muda dan tua dan terdapat mekanisme penguatan organisasi komunitas.

- c. Prinsip Budaya

Prinsip budaya dengan indikator mendorong masyarakat untuk menghormati budaya yang berbeda, mendorong berkembangnya pertukaran budaya dan adanya budaya pembangunan yang melekat erat dalam budaya lokal.

¹⁵ Choliq Sabana Danang Satrio, 'Pengembangan Community Based Tourism Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat', *Jurnal PENA*, 32.1 (2018), 1–26.

¹⁶ Potjana Suansri, *Community Based Tourism Handbook* (Thailand: REST Project, 2003). 21-22

d. Prinsip Lingkungan

Prinsip lingkungan dengan indikator pengembangan *carrying capacity area*, terdapat sistem pembuangan sampah yang ramah lingkungan dan adanya kepedulian tentang pentingnya kontroversi.

e. Prinsip Politik

Prinsip politik dengan indikator terdapat upaya peningkatan partisipasi dari penduduk lokal, terdapat upaya untuk meningkatkan kekuasaan komunitas yang menjamin hak-hak masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam.

Suansri mengungkapkan kelima prinsip tersebut merupakan wujud terlaksananya pariwisata yang berkelanjutan.

D. Pendapatan Masyarakat

1. Pengertian Pendapatan Masyarakat

Dalam KBBI, pendapatan dapat dipahami sebagai hasil kerja. Sebaliknya, pendapatan didefinisikan oleh kamus manajemen sebagai segala uang yang diterima oleh orang, bisnis, atau organisasi dalam bentuk komisi, biaya, bunga, upah, komisi, gaji, sewa, atau keuntungan. Menurut sudut pandang lain, pendapatan adalah apa yang diterima masyarakat sebagai imbalan atas kerja yang dilakukannya selama jangka waktu yang telah ditentukan.¹⁷

¹⁷ Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi : Teori Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006). 47

Pendapatan yang ditetapkan oleh Reksoprayitno adalah dana yang diterima oleh seseorang atau suatu organisasi dalam bentuk penghasilan, keuntungan, sewa, gaji, dan tunjangan lainnya termasuk asuransi kesehatan dan pensiun.¹⁸ Gaji dan upah, kekayaan yang diperoleh dari usaha sendiri, dan pendapatan dari sumber lain merupakan tiga jenis pendapatan utama yang dapat diperoleh dengan tiga cara berbeda.

2. Macam-Macam Pendapatan Masyarakat

Pendapatan masyarakat dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari melalui gaji, imbalan, atau upah dari usaha yang berhasil diselesaikan oleh individu atau kelompok keluarga dalam jangka waktu tertentu. Dua kelompok pendapatan masyarakat dapat dibedakan:¹⁹

- a. Pendapatan tetap (*Permanent Income*) seperti gaji atau pendapatan gaji, diartikan sebagai pendapatan yang dapat diprediksi sebelumnya dan pasti dibayarkan pada jangka waktu tertentu
- b. Pendapatan sementara (*Transitory Income*) uang yang tidak dapat diprediksi sebelumnya disebut sebagai pendapatan sementara, atau pendapatan sementara.²⁰

Secara garis besar, terdapat tiga sumber pendapatan yang dapat diperoleh melalui tiga saluran dan teknik berbeda, yaitu:

¹⁸ Sulistyowati and Neny Romadhona Nurhadija Putri, 'Pengelolaan Peternakan Ayam Ras Petelur Dalam Meningkatkan Pendapatan Ditinjau Dari Manajemen Bisnis Syariah', *Al-Muraqabah: Journal of Management and Sharia Business*, 2.2 (2022), 166–89 <https://doi.org/10.30762/almuraqabah.v2i2.281>

¹⁹ Algifari Guritno Mangkoesobroto, *Teori Ekonomi Makro* (Yogyakarta: STIE YKPN, 1998). 72

²⁰ Boediono, *Pengantar Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 2002). 150

- 1) Gaji dan Upah merupakan pemberian yang diberikan kepada pegawai yang telah menyelesaikan pekerjaannya pada suatu perusahaan, organisasi, atau lembaga tertentu oleh pihak lain..
- 2) Seseorang bekerja demi uangnya sendiri untuk mengumpulkan kekayaan. Pendapatan ini dihasilkan dengan mengurangi pengeluaran, baik moneter maupun non-moneter, dari keseluruhan nilai produksi.
- 3) Pendapatan dari sumber luar. Di sini, uang diberikan secara cuma-cuma dan diperoleh tanpa usaha apa pun dari pihak pemberi.

Tingkat perekonomian suatu tempat merupakan salah satu faktor yang digunakan untuk menentukan apakah suatu tempat dapat dianggap maju. Rendahnya tingkat pendapatan berkorelasi dengan rendahnya tingkat kemajuan dan kesejahteraan di daerah tertentu. Sebaliknya kesejahteraan akan semakin besar jika tingkat pendapatan cukup tinggi.

3. Pendapatan Masyarakat Dalam Islam

Islam menjelaskan kemampuan seseorang dalam mencari uang ditentukan oleh kebutuhan pokoknya. Sementara itu, kekayaan didistribusikan dan didistribusikan kembali sebagian besar berdasarkan kualitas hidup seseorang, atau “nishab”, yang secara eksklusif terkait dengan pekerjaan dan kepemilikan pribadi. Menurut Islam, kemiskinan merupakan suatu hal yang tidak dapat diterima oleh masyarakat. Intinya, mereka yang berada dalam kemiskinan tidak mampu memenuhi kewajiban

zakat dan kebutuhan lainnya berdasarkan hukum Islam.²¹ Dengan demikian, Al-qur'an menjelaskan kerja dengan menyatakan bahwa manusia diciptakan untuk bekerja dan menghidupi dirinya sendiri. Seperti dalam QS Al-Balad ayat 4:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ۚ

Artinya:

“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah.”

Konsep Islam mempunyai beberapa hukum yang berkaitan dengan pendapatan, yaitu sebagai berikut:²²

- a. Adanya harta (pendapatan) yang disisihkan secara tegas untuk keperluan perniagaan.
- b. Menggunakan modal secara interaktif dengan komponen lain yang menopang pendapatan.
- c. Mengingat aset dapat ditambah atau dikurangi, posisikan aset tersebut sebagai objek selama pemutaran.
- d. Modal pokok, yang menunjukkan kemampuan untuk mengambil kembali modal.

²¹ Sulistyowati, Yayuk Sri Rahayu, and Chifni Darun Naja, ‘Penerapan Artificial Intelligence Sebagai Inovasi Di Era Disrupsi Dalam Mengurangi Resiko Lembaga Keuangan Mikro Syariah’, *Wadiah*, 7.2 (2023), 117–42 <https://doi.org/10.30762/wadiah.v7i2.329>

²² Husein Syahatah, *Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam* (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001). 150